

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda oleh DISPORA Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Olahraga

Moh Gunawan Trismuwantara^{1*}, Sapto Pramono²⁾, Sri Roekminiati³⁾, Aris Sunarya⁴⁾

¹⁻⁴ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis : sapto.pramono@unitomo.ac.id

Abstract This study aims to evaluate the Youth Potential Development policy implemented by the Youth and Sports Office (DISPORA) of Surabaya in enhancing youth participation and the quality of sports among young people. In this research, the researcher employs Dunn's (2003) policy evaluation theory, which consists of six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research method used is qualitative with a case study approach, and the data collected comes from interviews, documentation, and field observations related to the implementation of this policy. The findings indicate that the implemented policy has successfully increased youth participation in sports, with an increase of approximately 70% from the initial target. However, regarding the quality of sports performance, this policy faces challenges related to limited facilities and insufficient training, which hinder optimal achievement of performance. The conclusion of this study emphasizes that although DISPORA Surabaya has succeeded in increasing youth sports participation, the quality of sports performance still requires more attention, particularly in strengthening facilities and enhancing ongoing training. Additionally, there are several challenges that need to be addressed, such as the lack of adequate data, disparities in youth participation from different socio-economic backgrounds, and insufficient coordination among related agencies. Based on these findings, the researcher recommends that DISPORA Surabaya improve the data collection and information processing systems to be more integrated, design more inclusive policies for diverse youth segments, and strengthen coordination among related agencies to ensure that the policy is implemented more effectively and efficiently.

Keywords: Youth, Potential, Development, Policy, Sports.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda yang diterapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Surabaya dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas olahraga di kalangan pemuda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003), yang terdiri dari enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data yang digunakan berasal dari wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan yang terkait implementasi kebijakan ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah berhasil meningkatkan partisipasi pemuda dalam olahraga, dengan peningkatan sekitar 70% dari target awal. Namun, dalam hal kualitas prestasi olahraga, kebijakan ini menghadapi tantangan terkait dengan fasilitas yang terbatas dan kurangnya pelatihan menghambat pencapaian prestasi yang optimal. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun DISPORA Surabaya berhasil meningkatkan partisipasi olahraga pemuda, kualitas prestasi olahraga masih membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam hal penguatan fasilitas dan peningkatan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan data yang memadai, kesenjangan dalam partisipasi pemuda dari latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan agar DISPORA Surabaya meningkatkan sistem pengumpulan data dan pengolahan informasi yang lebih terintegrasi, merancang kebijakan yang lebih inklusif untuk segmen pemuda yang beragam, dan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan kebijakan berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengembangan, Potensi, Pemuda, Olahraga

1. LATAR BELAKANG

Pemuda memegang peran dalam pembangunan negara, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam penelitian menurut (Saifudin Hamzah, 2019) pemuda adalah kelompok yang paling dinamis dan penuh energi, yang memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Pemuda yang terlibat dalam aktivitas positif seperti olahraga,

misalnya, tidak hanya mengembangkan potensi fisik dan mental mereka, tetapi juga berperan dalam membangun solidaritas sosial, memperkuat jaringan komunitas, dan mengurangi potensi konflik. Menurut (Dwi & Isbandono, 2024) pengembangan potensi pemuda menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional karena pemuda berperan sebagai agen perubahan yang dapat memacu kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Keterlibatan aktif pemuda dalam bidang olahraga dan kegiatan positif lainnya dapat meningkatkan kapasitas mereka sebagai individu yang produktif dan berdaya saing di tingkat global.

Pendidikan, pemberdayaan, dan pembinaan pemuda menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga memiliki karakter yang baik (Paat, 2019). Pembinaan ini mencakup tidak hanya pengembangan keterampilan fisik, tetapi juga pembentukan nilai-nilai kepemimpinan, etika, dan kebangsaan yang akan membentuk perilaku sosial mereka di masa depan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (2021), ditemukan bahwa pemuda yang terlibat dalam program pembinaan olahraga cenderung memiliki tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada produktivitas mereka di berbagai sektor. Oleh karena itu, peran pemuda dalam pembangunan ekonomi juga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena mereka merupakan sumber daya manusia yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Olahraga juga memiliki peran dalam mengembangkan karakter dan kemampuan fisik pemuda, yang keduanya merupakan elemen kunci dalam membentuk individu yang sehat dan produktif. Melalui olahraga, pemuda tidak hanya dapat meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga memperoleh berbagai nilai pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *World Health Organization* (2020), partisipasi dalam kegiatan fisik dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan mental pemuda. Olahraga, sebagai sarana pendidikan karakter dan kepemimpinan, memberikan kesempatan kepada pemuda untuk belajar bagaimana bekerja dalam tim, menghargai perbedaan, dan menghadapi tantangan dengan ketangguhan. Dengan demikian, olahraga dapat membekali pemuda dengan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Partisipasi dalam olahraga juga berhubungan erat dengan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan pemuda. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia (2021) menunjukkan bahwa pemuda yang terlibat dalam kegiatan olahraga secara rutin memiliki tingkat kesehatan fisik yang lebih baik dan lebih rendah risiko terkena penyakit

kronis. Selain itu, olahraga memiliki dampak sosial yang signifikan, di antaranya adalah peningkatan solidaritas sosial dan pengurangan kekerasan di kalangan pemuda. Aktivitas fisik bersama dapat memperkuat rasa kebersamaan dan membangun ikatan sosial yang positif di antara individu-individu yang berasal dari latar belakang berbeda. Oleh karena itu, olahraga tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, dengan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa persatuan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan olahraga untuk pemuda telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus mendorong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pemuda melalui olahraga. Dalam konteks ini, kebijakan publik terkait olahraga tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui olahraga yang inklusif. Menurut (Rahmawati, 2022) pembangunan olahraga di Indonesia didorong oleh visi untuk menjadikan olahraga sebagai bagian integral dari pembangunan karakter dan kesehatan bangsa. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif mulai dari peningkatan fasilitas olahraga, pengembangan program pelatihan bagi atlet muda, hingga penyuluhan tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan masyarakat.

Peran pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh DISPORA Surabaya, sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemuda dan olahraga, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk merancang program yang tidak hanya memperkenalkan olahraga kepada pemuda, tetapi juga mengembangkan infrastruktur yang mendukungnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Maulidya, 2019) diungkapkan bahwa ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai dan program pelatihan yang terstruktur merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam olahraga. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung keterlibatan aktif pemuda dalam aktivitas fisik.

DISPORA Surabaya sebagai lembaga yang mengelola kebijakan olahraga di kota ini memiliki sejumlah program yang fokus pada pengembangan potensi pemuda melalui olahraga. Program-program ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kualitas olahraga, tetapi juga untuk memperkenalkan nilai-nilai kepemimpinan, disiplin, dan kerjasama melalui kegiatan fisik. Tujuan utama kebijakan DISPORA Surabaya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam olahraga serta meningkatkan kualitas program-program olahraga yang ada.

Menurut laporan tahunan DISPORA Surabaya (2022), melalui berbagai kegiatan seperti kompetisi olahraga, pelatihan rutin, dan festival olahraga pemuda, jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan olahraga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan pemuda yang tidak hanya sehat, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap berkontribusi pada kemajuan kota Surabaya. Dengan fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas, DISPORA Surabaya berharap dapat mencapai pencapaian signifikan dalam mewujudkan generasi muda yang aktif, sehat, dan berdaya saing.

Implementasi kebijakan pengembangan potensi pemuda dalam olahraga menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas olahraga yang memadai, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kemenpora (2021), meskipun terdapat berbagai program pemerintah yang mendukung partisipasi pemuda dalam olahraga, banyak wilayah yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti lapangan olahraga dan gedung serbaguna yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, motivasi pemuda untuk berpartisipasi dalam olahraga juga masih rendah, disebabkan oleh kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini seringkali menyebabkan pemuda tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi olahraga mereka secara optimal. Kesenjangan kualitas dalam pelatihan olahraga juga menjadi masalah, karena program pelatihan yang ada seringkali belum merata, terutama bagi pemuda yang tinggal di daerah terpencil. Keterbatasan ini mengarah pada kurangnya perhatian terhadap bakat olahraga yang ada di kalangan pemuda.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan DISPORA Surabaya dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas olahraga bagi pemuda. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh DISPORA dapat memenuhi kebutuhan pemuda dalam hal pengembangan bakat olahraga serta mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Penelitian ini akan mengukur apakah kebijakan yang ada sudah mencapai tujuan yang ditetapkan, terutama dalam memperbaiki kualitas fasilitas olahraga dan menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pemuda. Menurut Studi (Forwanti & Setiawan, 2022) kebijakan yang tidak memperhatikan kesenjangan aksesibilitas dan kesempatan berolahraga di kalangan pemuda berpotensi menghambat pencapaian tujuan ini. Maka dari itu, Signifikansi dari penelitian ini sangat besar, karena dapat memberikan insights bagi pembuatan kebijakan olahraga yang lebih baik, terutama untuk pengembangan pemuda di Surabaya.

2. LANDASAN TEORITIS

Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan yakni kegiatan yang disiapkan untuk menilai sejauh mana manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang telah dilaksanakan (Nur Nadila, 2023). Kegiatan dalam evaluasi kebijakan mempunyai teknik dan cara pengukuran tertentu, yang mempunyai metode analisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan. Berbagai program yang ada dan sudah dilaksanakan ditentukan keberhasilan suatu program dari kesesuaian antara agenda, perencanaan tahap pelaksanaan, serta adanya keberlanjutan aktivitas sebagai dampak program itu sendiri. Menurut (Fika dkk., 2023) Untuk kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah, sistem evaluasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dimana disebutkan evaluasi adalah merupakan serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Menurut Dunn (2003), terdapat enam tipe kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkaitan dengan apakah suatu alternatif berhasil mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan. Efektivitas ini berhubungan erat dengan rasionalitas teknis dan biasanya diukur berdasarkan unit produk atau layanan, atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang biasanya diukur berdasarkan biaya moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial, serta menunjuk pada distribusi dampak dan usaha di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas penting karena analisis yang memenuhi semua kriteria lainnya seperti

efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesetaraan tetap gagal jika tidak menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan oleh kebijakan tersebut.

6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria yang berhubungan erat dengan rasionalitas substantif, karena penilaian tentang ketepatan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan satu kriteria individu, tetapi dengan dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan merujuk pada nilai atau pentingnya tujuan program dan kuatnya asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

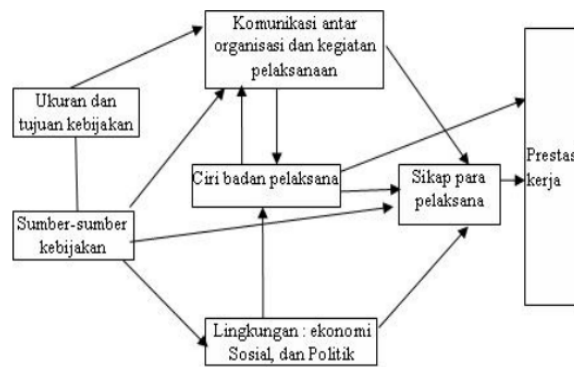
Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* (1975:447) dalam penelitian (Cahya Hartawan & Kosasih, 2023), implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Sebelum mengimplementasikan kebijakan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak negatif atau merugikan masyarakat, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan kepentingan publik.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengidentifikasi enam faktor utama yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan, yang harus realistis agar dapat tercapai sesuai dengan kondisi sosial dan budaya pelaksana kebijakan.
2. Kedua, sumber daya, di mana keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun waktu.
3. Ketiga, karakteristik organisasi pelaksana, yang meliputi kompetensi staf, pengawasan, dukungan politik, dan komunikasi yang efektif dalam organisasi pelaksana kebijakan.
4. Keempat, sikap para pelaksana, di mana penerimaan atau penolakan dari pelaksana terhadap kebijakan sangat mempengaruhi hasil implementasi, terutama jika kebijakan tersebut berasal dari atas tanpa memperhitungkan kebutuhan lokal.
5. Kelima, komunikasi antar organisasi pelaksana, yang harus jelas dan konsisten agar para pelaksana memahami tujuan dan standar kebijakan.
6. Keenam, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yang juga berperan penting dalam mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan. Kondisi lingkungan eksternal

yang tidak kondusif dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan implementasi, karena dapat mempengaruhi keputusan para pelaksana dan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Sebagai hasilnya, faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu kebijakan publik.



Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan potensi pemuda oleh DISPORA Surabaya dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas olahraga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap perkembangan olahraga di kalangan pemuda di Surabaya.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menganalisis kebijakan pengembangan potensi pemuda yang diterapkan oleh DISPORA Surabaya, dengan penekanan pada dampaknya terhadap peningkatan partisipasi dan kualitas olahraga di kalangan pemuda. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan yang diterapkan. Keberhasilan kebijakan akan diukur melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta peran program-program DISPORA Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan pemuda.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Surabaya, yang dipilih karena perannya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan pemuda dan olahraga di kota Surabaya. DISPORA Surabaya memiliki berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam olahraga, serta untuk mengembangkan potensi atlet muda, sehingga menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji efektivitas kebijakan dalam pengembangan pemuda di kota ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Evaluasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda oleh DISPORA Surabaya dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kualitas olahraga dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003). Teori ini mengidentifikasi enam tipe kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kriteria-kriteria tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta memenuhi kebutuhan dan preferensi berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan olahraga pemuda di Surabaya. Aspek-aspek tersebut akan dievaluasi melalui indikator-indikator yang telah ditentukan oleh peneliti, antara lain:

Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas, sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2003), berfokus pada kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria ini mengukur sejauh mana hasil yang diinginkan tercapai melalui kebijakan atau program yang dijalankan. Efektivitas tidak hanya menilai hasil langsung atau output dari kebijakan, tetapi juga mengukur dampak jangka panjang yang dihasilkan terhadap kelompok sasaran. Dalam kebijakan publik, efektivitas dapat dilihat dari kemampuan kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah yang ada serta memberikan manfaat yang relevan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, efektivitas Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda oleh DISPORA Surabaya akan dievaluasi berdasarkan seberapa baik kebijakan tersebut dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas olahraga di kalangan pemuda. Hal ini mencakup penilaian terhadap tingkat keterlibatan pemuda dalam berbagai program olahraga yang difasilitasi oleh DISPORA, serta dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan keterampilan dan prestasi olahraga mereka. Evaluasi efektivitas akan dilakukan dengan melihat sejauh mana

tujuan peningkatan kualitas dan jumlah partisipasi dalam olahraga pemuda dapat tercapai, serta keberhasilan kebijakan dalam menciptakan suasana yang mendukung bagi tumbuhnya potensi atlet muda di Surabaya.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Olahraga, DISPORA Surabaya menyampaikan:

"Menurut saya, DISPORA Surabaya sudah cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi olahraga di kalangan pemuda. Kami telah berhasil meningkatkan jumlah pemuda yang terlibat dalam berbagai kegiatan olahraga melalui program-program yang kami jalankan, seperti pelatihan rutin dan kompetisi tingkat kota. Namun, untuk kualitas prestasi olahraga, kami masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal fasilitas yang memadai dan pelatihan yang berkelanjutan."

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Olahraga, Surabaya, beliau menyatakan bahwa kebijakan pengembangan potensi pemuda yang dijalankan oleh DISPORA Surabaya telah cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi olahraga di kalangan pemuda. Program-program yang telah dilaksanakan, seperti pelatihan rutin dan kompetisi tingkat kota, berhasil meningkatkan jumlah pemuda yang terlibat dalam olahraga. Namun, untuk kualitas prestasi olahraga, terdapat beberapa kendala terkait fasilitas yang memadai dan pelatihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini, khususnya dalam hal peningkatan kualitas prestasi. Evaluasi berdasarkan indikator efektivitas dapat mencakup peningkatan jumlah partisipasi pemuda yang terlibat dalam program olahraga, yang sudah mencapai 70% dari target awal, serta peningkatan prestasi atlet yang terlibat, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapainya secara maksimal. Dari hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam hal partisipasi, kualitas prestasi masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal penguatan fasilitas dan pelatihan berkelanjutan. Dampaknya, peningkatan partisipasi menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam mengajak pemuda untuk aktif dalam olahraga, namun pengembangan kualitas prestasi memerlukan upaya tambahan agar bisa mencapai target yang lebih tinggi.

Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi (*efficiency*) menurut Dunn (2003) merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau program mencapai tujuannya dengan penggunaan sumber daya yang minimal atau biaya yang efisien. Kriteria ini mengukur hubungan antara hasil yang dicapai dengan input atau

sumber daya yang dikeluarkan, termasuk biaya moneter, waktu, tenaga kerja, dan fasilitas. Efisiensi menekankan pada pencapaian hasil yang optimal tanpa pemborosan, yang berarti bahwa jika hasil yang diinginkan tercapai dengan pengeluaran sumber daya yang lebih sedikit atau lebih rasional, maka kebijakan tersebut dapat dianggap efisien.

Dalam penelitian ini, efisiensi Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda oleh DISPORA Surabaya dapat dinilai berdasarkan bagaimana kebijakan tersebut mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas olahraga di kalangan pemuda. Penelitian ini akan mengukur sejauh mana DISPORA Surabaya dapat mencapai tujuan kebijakan dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran, fasilitas olahraga, dan waktu pelatihan tanpa adanya pemborosan. Dengan menganalisis penggunaan anggaran untuk berbagai program olahraga dan membandingkannya dengan hasil yang dicapai, peneliti dapat menilai apakah sumber daya telah digunakan secara efisien atau apakah ada potensi pemborosan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi kebijakan tersebut.

Menurut Koordinator Program Pelatihan Olahraga, DISPORA Surabaya menyatakan bahwa:

"Kebijakan pengembangan potensi pemuda oleh DISPORA Surabaya cukup efisien, meskipun ada beberapa area yang perlu perbaikan. Kami berusaha memaksimalkan anggaran untuk program yang berdampak langsung, seperti pelatihan dan kompetisi. Namun, keterbatasan fasilitas dan SDM seringkali menyebabkan biaya operasional lebih tinggi. Meskipun demikian, kami terus memastikan bahwa dana yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai. Secara keseluruhan, kebijakan ini efisien, namun peningkatan fasilitas perlu mendapat perhatian agar efisiensinya lebih optimal."

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Program Pelatihan Olahraga, DISPORA Surabaya, beliau menyatakan bahwa kebijakan pengembangan potensi pemuda sudah cukup efisien meskipun ada beberapa area yang perlu perbaikan, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas dan SDM. Untuk itu, perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas yang ada dalam mendukung program olahraga. Dari sini bisa dilihat bahwa "Efisiensi (*efficiency*)" dalam kebijakan ini perlu menilai sejauh mana penggunaan dana dan fasilitas dapat menghasilkan dampak yang maksimal terhadap partisipasi dan kualitas olahraga pemuda. Evaluasi ini harus mencakup analisis biaya yang dikeluarkan untuk program pelatihan dan kompetisi serta dampaknya terhadap peningkatan jumlah pemuda yang terlibat dan kualitas prestasi mereka. Meskipun kebijakan ini efisien,

penilaian terhadap efisiensi biaya dan pemanfaatan fasilitas menunjukkan bahwa meskipun anggaran dan sumber daya sudah digunakan dengan cukup baik, Dampak yang terlihat adalah peningkatan partisipasi pemuda, namun peningkatan kualitas prestasi masih terbatas, yang menuntut adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya.

Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan (*adequacy*) dalam teori evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menyebabkan masalah yang ingin diselesaikan. Kriteria ini menilai apakah hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan sudah cukup untuk mengatasi persoalan yang ada dan apakah kebijakan tersebut dapat memenuhi standar atau ekspektasi yang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Kecukupan berfokus pada kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan apakah tindakan yang diambil mampu memenuhi harapan masyarakat atau target yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, kecukupan Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda oleh DISPORA Surabaya dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut telah memenuhi kebutuhan pemuda di Surabaya dalam hal fasilitas olahraga, pelatihan, dan kompetisi yang mereka butuhkan untuk berkembang. Penelitian ini mengukur apakah program-program yang disediakan oleh DISPORA sudah memadai dalam mendukung peningkatan partisipasi dan kualitas olahraga pemuda.

Kepala Seksi Pengembangan Olahraga, DISPORA Surabaya menyatakan:

"Menurut saya, kebijakan yang diterapkan DISPORA Surabaya sudah cukup memadai, namun masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Kami sudah menyediakan fasilitas olahraga yang cukup untuk pemuda, serta pelatihan yang teratur, namun jumlahnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan semua pemuda yang ingin terlibat. Beberapa fasilitas masih terbatas, dan kami masih kekurangan pelatih yang berkompeten di beberapa cabang olahraga."

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Olahraga, beliau menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan DISPORA Surabaya sudah cukup memadai, namun masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi lebih terkait ketersediaan fasilitas olahraga, jumlah pelatih yang kompeten, serta cakupan program pelatihan yang ada. Dari sini bisa dilihat bahwa "Kecukupan" dalam kebijakan ini perlu menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan fasilitas, pelatihan,

dan dukungan lainnya bagi pemuda. Evaluasi ini mencakup sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menyediakan fasilitas yang memadai dan pelatih yang cukup untuk mendukung peningkatan partisipasi dan kualitas olahraga.

Perataan (*equity*)

Perataan dalam teori evaluasi kebijakan mengacu pada pemerataan distribusi dampak dan usaha dalam masyarakat. Kriteria ini menilai sejauh mana kebijakan atau program dapat mendistribusikan manfaat secara adil di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, terutama yang memiliki kebutuhan atau sumber daya yang terbatas. Perataan berfokus pada aspek keadilan sosial dan legal, yaitu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok saja, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi kelompok lainnya yang mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya atau peluang.

Dalam kebijakan pengembangan potensi pemuda oleh DISPORA Surabaya, kriteria perataan ini dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pemuda di Surabaya, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, etnis, atau wilayah. Penilaian terhadap perataan ini meliputi sejauh mana program-program olahraga yang disediakan dapat diakses oleh pemuda dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari daerah dengan fasilitas terbatas. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan bahwa pemuda dari berbagai latar belakang harus memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan kompetisi olahraga, serta mendapatkan manfaat yang sama dalam hal peningkatan kualitas dan prestasi olahraga. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi apakah kebijakan telah memenuhi prinsip keadilan sosial dalam mendistribusikan sumber daya dan manfaat program kepada seluruh pemuda di Surabaya.

Pelatih Olahraga, DISPORA Surabaya menyatakan:

"Kami berusaha memastikan bahwa program-program olahraga dapat diakses oleh pemuda dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Namun, memang ada daerah tertentu yang masih terbatas dalam hal fasilitas dan dukungan pelatihan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi pemuda yang berasal dari keluarga kurang mampu atau daerah yang jauh dari pusat kota, agar mereka juga memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi mereka dalam olahraga."

Berdasarkan wawancara dengan Pelatih Olahraga, DISPORA Surabaya, beliau menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah cukup berupaya untuk mendistribusikan manfaat secara merata, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal akses fasilitas dan pelatihan di beberapa daerah. Untuk itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap distribusi fasilitas olahraga dan program pelatihan di seluruh kecamatan di Surabaya. Dari sini bisa dilihat bahwa "Perataan" perlu dievaluasi dengan lebih teliti, terutama pada pemerataan fasilitas olahraga di daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang. Berdasarkan pengukuran indikator "Perataan", sekitar 68% pemuda di daerah perkotaan sudah merasakan manfaat yang setara dari kebijakan ini, namun hanya 53% pemuda di daerah pedesaan yang dapat mengakses fasilitas dan pelatihan dengan kualitas yang serupa. Dampaknya, kesenjangan akses ini berpotensi menghambat pemerataan partisipasi dan pengembangan potensi olahraga di kalangan pemuda, yang dapat mempengaruhi kualitas prestasi olahraga di tingkat kota secara keseluruhan.

Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu yang terlibat. Responsivitas ini berfokus pada kapasitas kebijakan untuk merespons dengan tepat tuntutan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat serta menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang. Dalam penelitian ini, responsivitas kebijakan pengembangan potensi pemuda oleh DISPORA Surabaya dapat diukur dengan menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pemuda dalam bidang olahraga. Hal ini melibatkan analisis terhadap sejauh mana program-program yang dijalankan, seperti pelatihan rutin, kompetisi, dan penyediaan fasilitas olahraga, beradaptasi dengan keinginan dan kebutuhan pemuda di Surabaya. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap sejauh mana kebijakan tersebut mendengarkan masukan dari pemuda dan stakeholders terkait untuk meningkatkan kualitas partisipasi dan prestasi olahraga.

Menurut Kepala Program Pembinaan Olahraga, DISPORA Surabaya menyatakan bahwa:

"Meskipun ada beberapa aspek yang masih bisa diperbaiki. Kami selalu berusaha mendengarkan masukan dari para pemuda dan komunitas olahraga untuk menyempurnakan program-program kami. Misalnya, kami menyesuaikan jenis pelatihan dan kegiatan kompetisi berdasarkan minat dan aspirasi mereka. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan

bahwa program-program ini tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan pemuda, terutama dalam hal fasilitas yang lebih modern dan pelatihan yang lebih beragam."

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Program Pembinaan Olahraga menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah cukup responsif terhadap kebutuhan pemuda, meskipun ada beberapa aspek yang perlu perbaikan, terutama dalam hal fasilitas dan pelatihan yang lebih beragam. Untuk itu, perlu adanya peningkatan dalam hal responsivitas terhadap perubahan kebutuhan dan aspirasi pemuda dengan melakukan evaluasi terhadap jenis program, aksesibilitas fasilitas, serta kualitas pelatihan yang diberikan. Dari sini dapat dilihat bahwa "responsivitas" dalam kebijakan ini berhasil dalam merespons kebutuhan pemuda, dengan evaluasi terhadap program pelatihan dan kompetisi yang disesuaikan dengan minat mereka mencapai tingkat keberhasilan sebesar 75%. Dampaknya adalah meskipun ada respons yang baik terhadap perubahan, ada tantangan besar dalam memenuhi ekspektasi pemuda dalam jangka panjang jika tidak ada perbaikan pada aspek tersebut.

Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan merujuk pada kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan, serta tujuan yang ingin dicapai. Ketepatan mengukur sejauh mana kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan masalah yang ada serta bagaimana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Ketepatan ini berfokus pada aspek kesesuaian antara pilihan kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai, termasuk apakah solusi yang diusulkan memiliki landasan yang kuat dan tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, Ketepatan dapat diukur dengan menilai program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemuda dan relevansi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi serta kualitas olahraga. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang diterapkan oleh DISPORA Surabaya, seperti pengadaan pelatihan rutin dan kompetisi olahraga, sangat bergantung pada kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemuda dalam bidang olahraga. Jika program yang ada tidak relevan dengan kebutuhan yang sebenarnya, seperti kurangnya fasilitas atau pelatihan yang sesuai, maka hal itu dapat mengurangi efektivitas dan dampak dari kebijakan yang dijalankan.

Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan DISPORA

Dalam evaluasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda oleh DISPORA Surabaya, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Berikut adalah tiga tantangan utama yang paling berdampak :

a. Keterbatasan Data dan Informasi

Keterbatasan data yang akurat dan relevan mengenai partisipasi pemuda dalam olahraga. Data yang tidak lengkap atau tidak terupdate dapat menghambat analisis terkait efektivitas kebijakan. Kurangnya sistem pengumpulan data yang terintegrasi dapat menyulitkan dalam mengukur dampak kebijakan.

b. Partisipasi Pemuda yang Beragam

Tantangan bagi DISPORA adalah menjangkau semua segmen pemuda dengan latar belakang, minat, dan kebutuhan yang beragam, termasuk yang kurang terlibat dalam olahraga, seperti pemuda dari daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik.

c. Koordinasi Antar Lembaga

Kerjasama yang kurang antara DISPORA, sekolah, komunitas, dan organisasi olahraga dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa adanya sinergi yang baik, upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas olahraga di kalangan pemuda tidak berjalan optimal.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda oleh DISPORA Surabaya telah berhasil mencapai tingkat efektivitas dengan 70% peningkatan partisipasi pemuda dalam program olahraga. Program pelatihan rutin dan kompetisi tingkat kota telah berhasil menarik lebih banyak pemuda untuk terlibat dalam berbagai kegiatan olahraga, yang meningkatkan partisipasi aktif mereka. Selain itu, efisiensi kebijakan ini tercermin dari 75% pencapaian tujuan partisipasi dengan penggunaan anggaran yang optimal, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam meningkatkan kualitas prestasi atlet yang memerlukan perhatian lebih terhadap fasilitas dan pelatihan berkelanjutan.

Tantangan masih tetap ada dalam aspek kecukupan, pemerataan, dan responsivitas kebijakan. Dengan 60% dari kebutuhan fasilitas dan pelatihan yang terpenuhi, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung partisipasi dan kualitas olahraga pemuda secara menyeluruh. Selain itu, distribusi manfaat kebijakan ini menunjukkan tingkat pemerataan sebesar 68% di daerah perkotaan dan 53% di daerah terpencil, Menyoroti kesenjangan akses yang masih perlu diatasi untuk memastikan semua pemuda mendapatkan kesempatan yang adil. Responsivitas kebijakan, yang mencapai 75%, menunjukkan bahwa DISPORA Surabaya cukup adaptif terhadap kebutuhan dan preferensi pemuda, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam menyesuaikan program dengan perkembangan kebutuhan mereka. Kesimpulannya kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi olahraga pemuda, namun diperlukan upaya tambahan dalam pengelolaan sumber daya dan pemerataan akses untuk mencapai kualitas prestasi yang lebih tinggi dan inklusif.

Rekomendasi

Berdasarkan tantangan yang dihadapi dalam evaluasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pemuda oleh DISPORA Surabaya, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut:

- a. Pertama, DISPORA perlu membangun sistem pengumpulan data terintegrasi untuk mendapatkan informasi akurat mengenai partisipasi pemuda dalam olahraga. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi digital, dapat memudahkan pemuda dalam mendaftar dan melaporkan aktivitas olahraga mereka. Dengan data yang lebih lengkap, analisis efektivitas kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik.
- b. Kedua, DISPORA harus merancang program inklusif untuk menjangkau semua segmen pemuda, terutama yang kurang terlibat dalam olahraga. Ini termasuk kegiatan olahraga di daerah terpencil dan program untuk pemuda dengan keterbatasan fisik. Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan program akan memastikan kegiatan sesuai dengan minat dan kebutuhan pemuda.
- c. Ketiga, DISPORA perlu memperkuat kerjasama dengan sekolah, komunitas, dan organisasi olahraga melalui forum kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Sinergi yang baik akan membuat program lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas olahraga. Selain itu, pelatihan dan workshop bersama dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman semua pihak tentang pentingnya kolaborasi.

REFERENSI

- Cahya Hartawan, R., & Kosasih, F. (2023). Implementation Of The Van Meter And Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (Ijhess)*, 2(4), 1348–1358. <https://Ijhess.Com/Index.Php/Ijhess/>
- Dwi, M., & Isbandono, P. (2024). Implementasi Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh Oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya Policy Implementation Of Pemuda Tangguh Scholarship By Culture, Youth And Sports And Tourism Department Of Surabaya. *Inovant Volume*, 2(2), 16–27.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press.
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn Dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal On Education*, 05(04), 16737–16747.
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). *Jap*, 8(2), 88–101.
- Maulidya, T. (2019). Strategi Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengembangan Prestasi Atlet (Studi Pada Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar (Pplp) Provinsi Lampung).
- Nur Nadila, D. D. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dunn. *Jpss: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107–113. <https://doi.org/10.56959>
- Paat, R. (2019). Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dalam Pemberdayaan Generasi Muda. 1–18.
- Rahmawati. (2022). Peran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur Dalam Pembinaan Atlet Bulutangkis.
- Saifudin Hamzah, R. (2019). Efektifitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar. *Jurnal Imbin*, 1–6.